

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek fundamental bagi pembangunan suatu negara, hal ini berkaitan dengan keberhasilan pembangunan negara dalam menekan laju inflasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana aktivitas-aktivitas dalam sistem perekonomian mengalami perkembangan yang berujung pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi adalah peningkatan harga yang cenderung terus menerus, sehingga inflasi menjadi permasalahan utama yang ada pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹ Dikutip dari website Bank Indonesia, inflasi ialah meningkatnya harga pada suatu barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan ini baru bisa dikatakan sebagai inflasi jika kenaikannya memiliki dampak secara langsung yang akhirnya meluas terhadap harga lainnya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan atau gambaran pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah yang mengalami perubahan disebabkan oleh berbagai faktor, bisa dikatakan karena adanya faktor guncangan terhadap perekonomian

¹ Mastura Mastura, (2021) , ‘Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Volume Perdagangan, Dan Dividend Payout Ratio Terhadap Share Price Volatility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas100 Tahun 2014 – 2018’, *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5.1, 1–15 <<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2598>>.

sehingga mempengaruhi pergerakan ekonomi seperti salah satunya kelangkaan barang yang mempengaruhi harga suatu barang.

Faktor guncangan (*shock*) menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap Inflasi yang terjadi di Indonesia, dan faktor ini memiliki dampak yang sangat besar sehingga menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi. Bentuk faktor guncangan tersebut ialah bencana alam yang berdampak signifikan terhadap komoditas harga pangan (*volatile food*) sehingga mengganggu kelancaran aktivitas produksi dan distribusi.

Terdapat indikator lainnya yaitu harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi naik yang berdampak secara langsung kepada masyarakat karena pemerintah yang mengendalikan harga barang (*managed price*), tentu saja adanya hal tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat terutama pada perekonomian di Indonesia.² Oleh karena itu, mempelajari inflasi terutama perilaku inflasi menjadi sangat penting agar dapat mendorong langkah pengambilan suatu kebijakan yang responsif terhadap adanya perubahan dari tekanan inflasi yang terjadi dalam negeri, sehingga pengendalian inflasi mampu dilakukan dengan langkah yang lebih efektif.

Bank Indonesia (BI), dalam upayanya mencapai angka dengan tingkat inflasi yang rendah sesuai dengan target yang ditentukan dan stabil, dimana memiliki kewenangan untuk menentukan serta melaksanakan kebijakan moneter.

² Surya Dharma, (2015) , ‘Analisis Peranan Tim Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara’, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3.4, 278–92.

BI menerapkan suatu kerangka kerja yang dikenal sebagai *Inflation Targeting Framework* (ITF).

Sasaran atau target inflasi ini ialah bentuk level yang harus dicapai oleh Bank Indonesia melalui koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah yang berdasarkan oleh penetapan inflasi yang tercantum dalam Undang-Undang yang mengatur Bank Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam pasal 10 ayat 1 (a) yaitu menjelaskan tentang Bank Indonesia dengan sasaran inflasi yang telah disepakati oleh Bank Indonesia sendiri, maka setelah berlakunya undang-undang ini, sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia.

Adapun target dan sasaran inflasi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia yang telah ditetapkan ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target Inflasi dan Aktual Inflasi Indonesia

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual (%,yoy)
2001	4% - 6%	12.55
2002	9% - 10%	10.03
2003	9+1%	5.06
2004	5,5+1%	6,40
2005	6+1%	17,11
2006	8+1%	6,60
2007	6+1%	6,59

2008	5+1%	11,06
2009	4,5+1%	2,78
2010	5+1%	6,96
2011	5+1%	3,79
2012	4,5+1%	4,30
2013	4.5+1%	8,38
2014	4.5+1%	8,36
2015	4+1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017	4±1%	3,61
2018	3,5±1%	3,13
2019**	3,5±1%	2,72
2020**	3±1%	1,68
2021**	3±1%	1,87
2022*	3±1%	5,51
2023*	3±1%	2,61

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa inflasi aktual masih jauh dari target inflasi yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa inflasi tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2001, 2005 dan 2008. Pada 2001, Inflasi terjadi dikarenakan oleh adanya kenaikan harga pada kelompok barang diantaranya yaitu perumahan, pendidikan, rekreasi & olahraga, transpor & komunikasi, kesehatan, bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, serta sandang. Inflasi tinggi mencapai 17,11 pada tahun 2005, yang disebabkan oleh kenaikan harga perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar

sebesar 3,89 persen. Sementara, komoditas yang paling banyak memberikan sumbangan inflasi nasional ialah tarif angkutan dalam kota yang mencapai 2,79 persen dan diikuti harga bensin sebanyak 2,61 persen.

Pada 2008, inflasi nasional kembali tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dalam negeri, konversi minyak tanah ke LPG, dan tingginya harga komoditas internasional. Adapun inflasi terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,45 persen, sehingga inflasi hanya mencapai 1,68 persen yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah sejak BPS merilis angka inflasi di Indonesia.

Kemampuan Bank Indonesia dalam mengontrol tingkat inflasi menjadi terbatas ketika menghadapi faktor guncangan yang besar, maka pencapaian target inflasi dengan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dengan implementasi kebijakan makroekonomi yang menyeluruh yang melibatkan aspek fiskal, moneter, dan sektoral. Adanya peran dan kerja sama ini sangat dibutuhkan terutama dalam mencegah terjadinya angka inflasi yang naik seperti pada tahun 2022. Hal ini kembali menjadi issue inflasi nasional yang mencapai angka sebesar 5,51 persen, sumbangan terbesar inflasi ini ada di Provinsi Jambi.

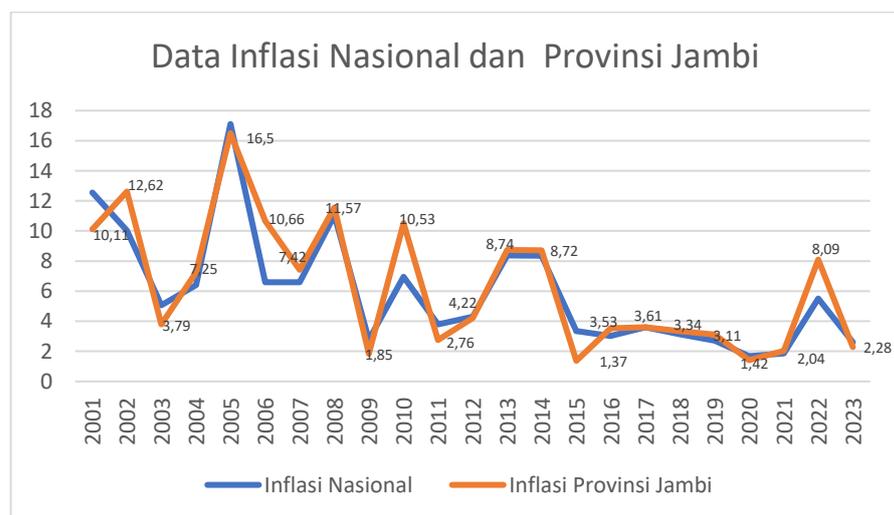
Provinsi Jambi dinyatakan daerah inflasi tertinggi di Indonesia yang menyentuh angka 8,55% pada bulan Juni tahun 2022. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, terdapat dua daerah yang menyumbang tingkat inflasi tertinggi di tingkat nasional, yaitu Kota Jambi

menempati peringkat kedua, sementara Kabupaten Bungo menempati peringkat pertama dari total 90 kota yang menjadi sampel dalam mengukur inflasi aktual. Inflasi tahunan gabungan dua kota itu tercatat 6,35 persen karena ketersediaan barang kebutuhan dan naiknya harga di pasar. Tercatat bahwa komoditas pangan mencapai 11,47 persen (secara tahunan/yoy) dari seharusnya maksimal 6 persen.

Pada triwulan kedua tahun 2022, tingkat inflasi di Provinsi Jambi mencapai 7,01% (tahunan) yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua periode tahun sebelumnya yaitu 2,83% dan 4,35%. Tingkat inflasi Provinsi Jambi mencakup inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, masing-masing mencatatkan 6,94% dan 7,63% (tahunan) pada triwulan tersebut. Berikut dapat dilihat bagaimana inflasi di kota Jambi tahun 2001 hingga 2023.

Gambar 1.1

Data Inflasi Nasional dan Provinsi Jambi



Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Dengan berdasarkan informasi statistik di atas maka terlihat bahwa inflasi tertinggi yang dicapai oleh Provinsi Jambi adalah pada tahun 2005, 2008, 2010,

dan 2022. Terutama pada tahun 2005, hal ini dikarenakan dampak inflasi nasional yang juga tinggi. Faktor lingkungan akibat inflasi di Provinsi Jambi menyebabkan daya beli masyarakat masih relatif rendah, menempati urutan ketiga terendah di Sumatera, setelah Lampung dan Bengkulu.

Laju inflasi yang tinggi di Provinsi Jambi ini karena adanya tekanan yang meningkat permintaan rumah tangga dalam pengeluaran konsumsi dengan proporsi yang sangat tinggi serta adanya gangguan dari sisi suplai akibat tingkat akumulasi kapital yang kurang termasuk akumulasi kapital di sektor publik khususnya peningkatan penyediaan dan pemeliharaan parasarana transportasi darat.

Selain itu, inflasi tinggi di Provinsi Jambi juga masih disebabkan oleh ketergantungan pada pasokan bahan pangan dari luar daerah sehingga membuat harga bahan pangan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi dan peningkatan harga. Fluktuasi harga komoditas pangan merupakan faktor penting yang turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat inflasi di Provinsi Jambi. Kecilnya peran pemerintah daerah bersama pelaku ekonomi lokal dalam mengambil langkah-langkah mengurangi inflasi dalam penawaran diakibatkan dari besarnya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, harga komoditas pangan yang tinggi bersumber pada kelangkaan komoditas, harga yang ditetapkan oleh distributor serta meningkatnya biaya transportasi. Hal ini sejalan dengan sedikitnya jumlah penyalur komoditi non-makanan dibandingkan dengan jumlah penyalur komoditi makanan.

Komponen belanja konsumen mempunyai sifat inflatoir, yang biasanya menjadi pendorong pada kenaikan tingkat inflasi. Hasil demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang naik juga diikuti oleh kenaikan laju inflasi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menargetkan inflasi yang sudah dimulai pada tahun 2005. Namun demikian, usaha dalam menciptakan inflasi yang rendah di Indonesia belum menunjukkan hasil yang ideal. Khususnya Provinsi Jambi.

Adapun lima arahan sebagai penjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan menurut Presiden Ir. Joko Widodo, yang mampu mendorong daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Arah pertama adalah menemukan sumber tekanan inflasi lokal dengan menggunakan data makro dan mikro secara rinci. Kedua, untuk mengurangi perbedaan harga dan pasokan antara wilayah, diperlukan pengembangan kerja sama antardaerah (KAD). TPIP dan TPID bertanggung jawab untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki surplus dan defisit serta membantu mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi. Yang ketiga, mengurangi biaya transportasi dengan menggunakan fasilitas perdagangan antardaerah. Selanjutnya, anggaran belanja tidak terduga digunakan secara optimal untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Selain itu, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dipercepat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah memantau ketersediaan harga melalui sidak harga pangan, operasi pasar, dan kegiatan pasar murah. Selain itu, pemerintah secara teratur memantau ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, dan

komunikasi yang efektif melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Jambi.

GNPIP telah berjalan di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia termasuk Provinsi Jambi, hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan sinergi untuk mendukung upaya pengendalian inflasi pangan. Melalui kegiatan ini, Provinsi Jambi mencanangkan tema Sinergi Memperkuat Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan dengan 3 fokus utama yaitu pemerintah Provinsi Jambi membentuk TPID untuk meningkatkan produksi pangan, meningkatkan kerjasama antar daerah, dan stabilisasi harga pangan. Bersama dengan TPID, pemerintah telah menyusun berbagai rencana strategis upaya pengendalian inflasi.

Ketahanan pangan adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur pertanian serta peningkatan kualitas produk pertanian lokal. Forkopimda, OPD, dan UPT yang bergerak di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Jambi berperan penting dalam merumuskan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Sinergi dan Inovasi dalam Penguatan Ketahanan Pangan termasuk pemantauan harga pangan strategis untuk menjaga kestabilan harga pangan antara lain.

Rencana strategis ini dilaksanakan dalam berbagai aksi dan langkah kongkrit jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana jangka pendek yang dilaksanakan meliputi penguatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi,

penguatan kampanye masyarakat untuk menyesuaikan pola konsumsi cabai kering, pemetaan wilayah produksi pangan, kolaborasi dengan tim teknis TPID di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, program OPD untuk mendukung peningkatan produktivitas petani, pengalokasian belanja tidak terduga (BTT), dan pengendalian inflasi daerah di APBD-P. Disisi lain, TPID juga melaksanakan kinerja Rencana jangka Menengah mencakup sosialisasi pada petani hortikultura dalam penggunaan pupuk organik, mengoptimalkan fungsi TTIC (Toko Tani Indonesia Center), peningkatan kapasitas CAS (*Control Atmosphere Storage-Gudang Penyimpanan Hasil Pangan*). Rencana ini juga mencakup pendidikan tentang adopsi teknologi pengeringan cabai, program kampung peduli/penyangga inflasi, dan bantuan bibit cabai. Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan daerah yang menghasilkan komoditas.

Dalam hal ini pula, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan angka inflasi tersebut, kondisi inflasi Kota Jambi terus melandai turun. Trend positif ini terus berlangsung dari bulan Agustus tahun 2022, walaupun pada bulan September sempat mengalami kenaikan namun bulan selanjutnya kembali menurun. Kota Jambi mengalami inflasi negatif atau deflasi sebesar 0,55 % (*Month-to-Month*). Sehingga inflasi kumulatif Provinsi Jambi dari bulan Januari hingga November 2022 (*Year-to-Date*) menjadi 5,56 persen dan inflasi 12 bulan terakhir (*Year-on-Year*) menjadi 6,07 persen (November 2022 terhadap November 2021). Langkah ini bahkan diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri terkait langkah cepat dan tanggap oleh TPID kepada daerah dalam pengendalian inflasi. Hasilnya,

penurunan inflasi Kota Jambi dan Kabupaten Bungo yang sebelumnya peringkat ke-2 dan ke-1 inflasi tertinggi dari 90 kota mampu turun menjadi peringkat ke-31 dan ke-44 pada Desember 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap penurunan inflasi di Provinsi Jambi. Sehingga dalam hal ini, Bank Indonesia berkoordinasi dengan TPID dalam menurunkan laju inflasi melalui beberapa program yang dilaksanakan.

Untuk memperkuat adanya penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai pendukung. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya meliputi hal-hal berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasatun, dkk. Pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh dalam Pengendalian Inflasi”.³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana TPID Kota Banda Aceh telah berperan aktif dalam pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Dan Komunikasi Efektif). Peran TPID dikategorikan sebagai aktif berdasarkan hasil analisis terhadap 14 indikator kinerja. Adapun Faktor-faktor yang mendukung peran TPID yaitu keberadaan

³ Nurhasatun, (2023), ‘Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Inflasi’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 8.2.

regulasi yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota TPID. Terdapat pula faktor penghambat yaitu keterbatasan data dan informasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang inflasi dan fluktuasi harga bahan pangan. Sementara itu yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam metode penelitian yang akan diterapkan. Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penjelasan temuan penelitian dipaparkan secara narasi. Sementara pendekatan yang akan digunakan berupa penerapan metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan perhitungan secara statistika.

Kedua, penelitian oleh Yurianto pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta".⁴ Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif. Dari hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi. BUMD, khususnya klaster pangan, berperan penting dalam menyediakan beberapa komoditas pangan utama. Sehingga inflasi di Jakarta relatif rendah dan stabil, kebijakan pengendalian inflasi di Jakarta cukup efektif, dan ada beberapa kesenjangan antara perhitungan inflasi dengan target inflasi dalam RPJMD 2017-2022. Sementara, terlihat bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu ini terdapat pada bagian metode penelitiannya masing-masing, lokasi penelitian serta fokus penelitian. Penelitian yang akan digunakan menggunakan metode deskriptif

⁴ Yurianto Yurianto, (2020), 'Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Dki Jakarta', *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17.1, 12
<<https://doi.org/10.30651/blc.v17i1.4179>>.

kuantitatif di daerah Provinsi Jambi dan membahas terkait peran TPID dalam menekan laju inflasi dan melihat pergerakan dalam menghadapi naik turunnya angka inflasi.

Penelitian mengenai analisis peran TPID terhadap penurunan angka inflasi merupakan topik yang sangat menarik untuk diangkat atau dilakukan karena alasan berikut. Pertama, untuk melihat bagaimana pergerakan inflasi daerah Provinsi Jambi sebelum dan sesudah adanya TPID sehingga dapat dianalisis perannya dalam memberikan kontribusi daerah. Kedua, Penelitian tentang TPID Jambi sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana inflasi menjadi salah satu isu utama ekonomi Indonesia yang perlu dikontrol dalam beberapa waktu tertentu karena sifatnya berubah-ubah tergantung kebijakan dari TPID. Ketiga, untuk mengetahui tindakan TPID dalam menghadapi tantangan inflasi seperti naik turunnya angka inflasi yang terjadi disuatu daerah sehingga dapat menentukan arah kebijakan yang lebih baik untuk kedepannya. Dengan memahami peran TPID, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang cara mengendalikan inflasi dan mengantisipasi terjadinya inflasi tinggi dalam suatu daerah.

Mengacu pada konteks masalah yang telah dirincikan dalam literatur di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Penurunan Angka Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan daripada rujukan penjelasan yang ada pada latar belakang, sehingga dapat dirumuskan masalah peneliian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menurunkan angka inflasi di Provinsi Jambi?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar inflasi di Provinsi Jambi kembali pada nilai alamiahnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis kemudian menjabarkan tujuan daripada penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Untuk mengetahui Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menurunkan angka inflasi di Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan agar inflasi di Provinsi Jambi kembali pada nilai alamiahnya

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini memiliki manfaat yang dapat dilihat secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis, penelitian ini memberikan gambaran tentang sejauh mana program TPID berhasil dalam mengendalikan laju inflasi sehingga mampu memperkaya wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program dalam masa yang akan

datang kedepannya terutama pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi di Provinsi Jambi.

2. Manfaat Teoritis, selain daripada manfaat praktis tersebut, pada penelitian ini juga mempunyai manfaat dalam teoritis. Adapun manfaatnya ialah menjadikan penelitian ini sebagai landasan sebagai masukan bagi penelitian-penelitian tentang menekan laju inflasi di Provinsi Jambi.

1.5. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, teori digunakan ketika menganalisis masalah sehingga dapat juga sebagai acuan atau landasan berfikir tahap-tahapan penelitian. Teori merupakan

1.5.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, tidak hanya dalam arti pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara saja, namun juga tata kelola yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan dan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, negara, populasi, dan masyarakat. Kebijakan adalah hasil dari kerja sama, kompromi, dan persaingan dalam berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan sehingga membentuk sistem politik suatu negara. Menurut Hogwood dan Gunn, kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Hal ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanya milik pemerintah atau didominasi oleh

⁵ Edy Suharto, (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

pemerintah, melainkan porganisasi non-pemerintah, seperti LSM, organisasi sosial (seperti Karang Taruna dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/KKP) dan organisasi sukarela lainnya juga memiliki kebijakan.

Implementasi dapat diartikan sebagai salah satu tahapan proses kebijakan publik dan biasanya terjadi setelah perumusan kebijakan dengan tujuan yang jelas. Menurut George C. Edwards, implementasi kebijakan merupakan suatu fase kebijakan publik, antara pembentukan suatu kebijakan dan konsekuensinya bagi masyarakat yang terkena dampaknya.⁶ Kemudian Wibawa berpendapat bahwa implementasi kebijakan berarti proses penetapan arah (mapping) dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan publik sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Berdasarkan pendapat para ahli ini maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun pejabat terhadap suatu objek/tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terjadi setelah pengumuman kebijakan yang sah, yang mencakup upaya pengelolaan masukan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik untuk diwujudkan melalui kegiatan

⁶ Hessel Nogi S, Tangkilisan, (2003), *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan 1, Yogyakarta: Lukman Offset.

⁷ Ibid.

lembaga pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁸ Dalam proses implementasi terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut banyak yang telah dikemukakan oleh ahli kebijakan, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan,⁹ yaitu:

1. Komunikasi, implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan para pelaksananya mengetahui apa yang harus dilakukan. Maksud dan tujuan kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran agar dapat mengurangi distorsi dalam implementasi.
2. Sumberdaya, sekalipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika pihak yang melaksanakannya tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Disposisi, sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaku kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi, bertugas melaksanakan implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

⁸ Merilee Grindle, (2017), *Politics and Policy Implementation in the Third World, Politics and Policy Implementation in the Third World*.

⁹ Subarsono, (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

1.5.2. Inflasi

Inflasi merupakan situasi atau kondisi dimana perekonomian suatu negara secara terus-menerus mengalami kenaikan harga segala jenis barang.¹⁰ Dari pengertian inflasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu krisis perekonomian dalam suatu wilayah ataupun negara yang menunjukkan kenaikan harga komoditas secara umum yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jika hanya satu atau dua jenis harga saja yang mengalami kenaikan maka hal tersebut tidak dapat disebut inflasi, namun jika inflasi meningkat maka harga barang lainnya akan naik. Keterkaitan inflasi dengan mekanisme pasar disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan konsumsi penduduk atau ketidakpastian distribusi barang. Penyebab kenaikan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu¹¹:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*) adalah inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat sehingga menyebabkan harga barang tersebut naik secara signifikan, misalnya peningkatan pengeluaran rumah tangga atau dunia usaha.
2. Inflasi Dorongan Penawaran (*Cost Push Inflation*) ialah peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi kemudian ditandai dengan adanya penurunan produksi dan peningkatan harga barang (kenaikan harga bahan baku impor dan bahan bakar).

¹⁰ Detri Karya, Syamri, (2017), *Makroekonomi : Pengantar Untuk Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1170827#>>.

¹¹ Prawoto, (2019), *Pengantar Ekonomi Makro*. Cetakan Pertama, Depok: Rajawali Pers. ISBN : 978-623-231-118-3.

Setiap negara memiliki cara menyelesaikan masalah inflasinya masing-masing karena pemicu terjadinya pada tiap-tiap negara pun berbeda. Dalam hal ini, terdapat pandangan dari Prawoto yaitu metode dalam mengatasinya inflasi dapat dilaksanakan melalui penerapan kebijakan diantaranya¹²:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter tujuannya yaitu untuk lebih menekankan jumlah uang beredar. Inflasi dikendalikan oleh bank sentral yang meningkatkan cadangan minimum, yang mengurangi jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat inflasi. Bank Indonesia dalam mengatur inflasi dengan menggunakan metode pengelolaan yaitu *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang menetapkan tingkat suku bunga pada ssetiap awal bulan.

2. Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal menyangkut pengaturan belanja pemerintah negara, mencakup aspek belanja negara dan pajak yang dapat berdampak langsung terhadap harga, dan bila diterapkan mengakibatkan penurunan permintaan agregat dan laju inflasi akan terkendali.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan output

Total output yang terus meningkat dapat dicapai karena adanya kebijakan yang dapat menurunkan bea masuk yang pada akhirnya meningkatkan biaya impor dan menurunkan harga barang. Oleh karena itu, peningkatan produksi dapat menurunkan tingkat inflasi. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam jangka pendek oleh pemerintah melalui Lembaga

¹² ibid

Pangan (BULOG). Inflasi digolongkan menjadi dua kategori: satu berdasarkan tingkat keparahannya, dan yang lainnya berdasarkan alasan awal dari peningkatan tersebut.¹³ yaitu:

1. Menurut tingkat keparahan inflasi yang terbagi menjadi empat, yaitu:

- a) Ringan $\leq 10\%$ pertahun
- b) Menengah sekitar 10% - 30% pertahun
- c) Tinggi yaitu sekitar 30% - 100% pertahun
- d) Hiperinflasi $\geq 100\%$ pertahun

2. Menurut alasan awal peningkatan inflasi yang terbagi menjadi dua yaitu:

a) Demand Inflation

Inflasi permintaan terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat di pasar namun tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan barang dan jasa di pasar.

b) Cost Inflation

Inflasi biaya ini karena kenaikan pada biaya produksi. Hal ini perekonomian pada dasarnya tidak terlepas akibat kegiatan ekonomi dari negara lain seperti penetapan harga minyak internasional.

Bank Indonesia menyatakan bahwa BPS di Indonesia menerbitkan inflasi menggunakan pengelompokan tambahan yang dikenal sebagai disagregasi inflasi. Ini dilakukan untuk menciptakan ukuran inflasi yang lebih memperhitungkan dampak faktor-faktor penting, selain pengelompokan yang didasarkan pada

¹³ Silalahi, Remus, Syahri Effendi, Darwin Damanik dan Muhammad Fahmi, (2013), Teori Ekonomi Makro. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*). Secara umum, dekomposisi inflasi terdiri dari:

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang biasanya menetap atau persisten dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti:
 - a. Interaksi permintaan-penawaran
 - b. Lingkungan eksternal, seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang.
 - c. Ekspetasi pedagang dan konsumen tentang inflasi
2. Inflasi non inti, yaitu bagian inflasi yang biasanya sangat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang penting.
 - a. Inflasi komponen bergejolak (*volatile food*), inflasi yang dipengaruhi oleh guncangan kelompok pangan seperti panen raya, bencana alam, atau faktor-faktor seperti tren harga pangan dalam negeri dan internasional.
 - b. Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*), inflasi yang dipengaruhi oleh harga pangan yang diatur pemerintah. Contohnya tarif listrik dan BBM bersubsidi

1.5.3. Persistensi Inflasi

Menurut Angeloni, persistensi inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan inflasi bergerak perlahan menuju nilai jangka panjang ketika adanya guncangan (*shock*) dalam perekonomian.¹⁴ Menurut Marquez, persistensi inflasi adalah kecepatan kembalinya tingkat inflasi ke tingkat keseimbangan setelah terjadi guncangan. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Willis yang

¹⁴ Alamsyah, H, (2008), *Persistensi Inflasi dan Implikasinya Terhadap Pilihan Kebijakan Moneter di Indonesia*.

mendefinisikan persistensi inflasi sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan inflasi untuk kembali ke garis awal (*baseline*) dikarenakan adanya guncangan.¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa persistensi inflasi adalah waktu yang dibutuhkan dalam kembalinya inflasi ke nilai alaminya setelah terjadi guncangan yang menyebabkan inflasi menjauh dari nilai alaminya.

1.6. Hubungan Antar Variabel

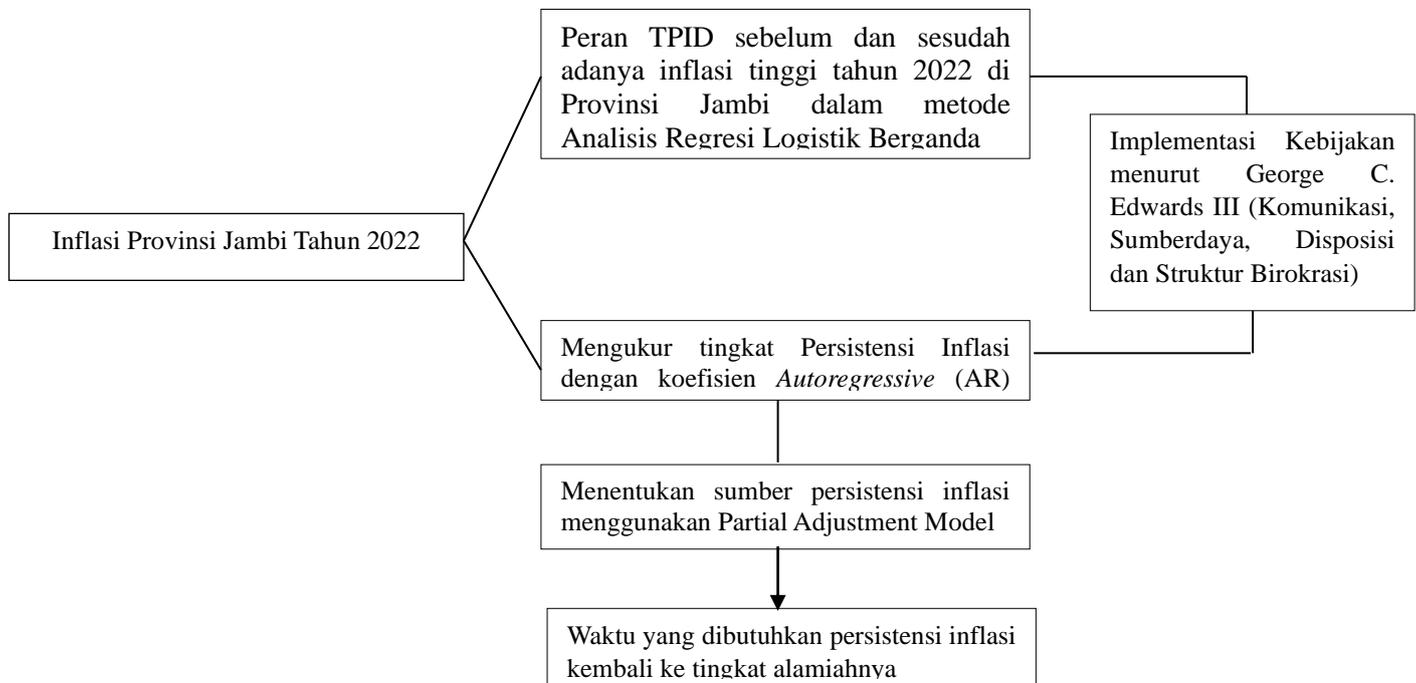
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel (X/bebas) yaitu Penurunan inflasi (Indeks Harga Konsumen dan inflasi) dan variabel (Y/terikat) adalah variabel dummy yaitu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi yang dapat ditimbulkan oleh adanya hubungan yang berpengaruh, namun tidak mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini mencoba mengenali pengaruh X1 dan X2 terhadap Y.

1.7. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang peran TPID terhadap Penurunan Inflasi, untuk memudahkan pemahaman terhadap urutan berpikirnya, peneliti menjelaskan struktur kerangka berpikir sebagai berikut:

¹⁵ Arimurti, T., & Trisnanto, B, (2011), Persistensi inflasi di Jakarta dan implikasinya terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 14(1), 5-30.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



1.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.¹⁶ Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah terhadap penurunan angka inflasi di Provinsi Jambi.

Ha : Tidak ada pengaruh signifikan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah terhadap penurunan angka inflasi di Provinsi Jambi.

¹⁶ Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Mix Method* atau metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode, di mana data kuantitatif menyediakan generalisasi yang lebih luas, sedangkan data kualitatif memberikan kedalaman pemahaman yang lebih detail tentang konteks dan makna di balik data.

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, melalui metode kombinasi penelitian ini menyajikan informasi berupa angka-angka dalam melihat bagaimana peran TPID terhadap penurunan angka inflasi di Provinsi Jambi. Adapun jenis penelitian *mix method* menggunakan pendekatan Eksplanatori Sekuensial (*Explanatory Sequential Design*) yaitu penelitian yang dimulai dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode, di mana data kuantitatif menyediakan generalisasi yang lebih luas, sedangkan data kualitatif memberikan kedalaman pemahaman yang lebih detail tentang konteks dan makna di balik data.

Pada pengolahan data akan mempresentasikan sejauh mana variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan menarik kesimpulan di akhir penelitian. Variabel-variabel ini paling sering diukur menggunakan instrumen yang memungkinkan analisis data numerik melalui metode statistik dan penjelasan

mendalam. Laporan tertulis pada akhir mengikuti format yang ditentukan yang mencakup bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan literatur, teori, metodologi, hasil, dan diskusi.¹⁷

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengumpulkan data yang tepat untuk menggambarkan situasi dari objek yang sedang dilakukannya penelitian dengan akurat. Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Jambi.

1.9.3. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah analisis pada pembahasan penelitian, maka peneliti akan membatasi fokus penelitian akan mencakup pada Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menurunkan inflasi serta melihat berapa lama waktu persistensi inflasi melalui pergerakan inflasi beberapa tahun dan melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berjalan sehingga peneliti dapat menganalisis peranan TPID dalam menurunkan angka inflasi tahunan di Provinsi Jambi.

1.9.4. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merujuk pada segala elemen yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam berbagai bentuk, dengan tujuan untuk memungkinkan studi yang mendetail dan pengumpulan informasi yang relevan, yang nantinya akan menjadi dasar untuk menyimpulkan temuan.¹⁸ Pada penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) atau variabel X dan variabel terikat

¹⁷ Creswell. J.W. and Creswell, J.D, (2017), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th Edition, Newbury Park: SAGE Publications.

¹⁸ Op. Cit

(dependen) atau variabel Y. Adapun variabel bebas (X) terdiri dari tingkat inflasi dan IHK. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

2. Operasional Variabel

Dari variabel independen dan variabel dependen maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Variabel Independen

Variabel Independen atau sering disebut dengan variabel bebas. Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel lain, yaitu variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017:39). Variabel bebas nya yaitu penurunan angka inflasi, memiliki dua variabel independen yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Tingkat Inflasi, menurut Bank Sentral Republik Indonesia, inflasi didefinisikan sebagai peningkatan harga secara keseluruhan dan berkelanjutan. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dianggap sebagai inflasi kecuali jika kenaikan tersebut meluas (atau menyebabkan kenaikan harga) pada barang lain. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tingkat inflasi yang digunakan adalah jenis tingkat inflasi bulanan di Indonesia.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK), atau *Consumer Price Index* (CPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, variabel bebas IHK adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan IHK, tetapi tidak dipengaruhi langsung oleh IHK itu sendiri. Variabel bebas ini adalah variabel-variabel ekonomi atau eksternal yang dapat mengubah harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

b) Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang disebut dengan variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang merupakan data biner (dummy), hal ini berkaitan dengan bagaimana peran TPID ketika tahun 2022 inflasi naik di Provinsi Jambi. Peran yang dilakukan sebelum inflasi naik tahun 2022 diberi kode “0” dan peran yang dilakukan setelah inflasi mengalami penurunan diberi kode “1”.

1.9.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi, menurut Suryani dan Hendryadi, adalah sekelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi subjek penelitian dan memiliki karakteristik tertentu.¹⁹ Populasi tidak hanya mencakup orang dan orang, tetapi juga benda dan benda lainnya melainkan populasi mencakup semua atribut dan sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi penelitian ini adalah Data Inflasi dan

¹⁹ Suryani, Hendryadi, (2015), Metode riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 11 kelompok pengeluaran yang ada di Provinsi Jambi.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam suatu penelitian. Keterwakilan sampel terhadap populasi sangat dipengaruhi oleh jenis sampel dan jumlah anggota yang diambil. Ketepatan jenis dan jumlah anggota sampel yang diambil sangat mempengaruhi keterwakilan sampel terhadap populasi. Keterwakilan populasi sangat mempengaruhi validitas kesimpulan yang dibuat dari penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan data runtun waktu (*time series*) sebagai pengambilan sampel.

Jenis teknik pengambilan sampel pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori: *probability* dan *non-probability*. Kategori *non-probability* termasuk pengambilan *sampling purposive*, sistematis, insidental, jenuh, dan *snowball*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *sampling purposive*, yang merupakan metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah dipertimbangkan, yaitu jumlah Tingkat inflasi tertinggi dan jumlah Indeks Harga Konsumen. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan beberapa kriteria yaitu:

- a. Sampel adalah IHK 11 kelompok pengeluaran Provinsi Jambi
- b. Sampel adalah IHK periode 2019 - 2023.
- c. Sampel adalah komoditas penyumbang terbesar dalam laju inflasi di Provinsi Jambi.

1.9.6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dalam mengetahui hasil bagaimana hasil implementasi kebijakan TPID Provinsi Jambi dan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang bersifat kuantitatif. Data sekunder yang akan diambil berbentuk runtun waktu (*time series*) yang diambil melalui publikasikan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Perekonomian dari Bank Indonesia Provinsi Jambi yang meliputi:

- a. Data inflasi tahunan yang diukur menggunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi dalam periode tahun 2019 – 2023
- b. Data kelompok dari komoditi penyusun IHK tahunan Povinsi Jambi yang dikategorikan dalam susunan 11 kelompok komoditas pengeluaran berdasarkan COICOP (*the Classification of individual consumption b purpose*) pada periode 2019 – 2023

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. Data pelaporan keuangan dikumpulkan melalui situs web Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Selain laporan perekonomian serta melampirkan olahan datanya. Selain itu, data yang dikumpulkan adalah data kegiatan tim pengelola inflasi daerah berupa laporan publikasi resmi, artikel, dan website pendukung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, dan terbitan berkala yang berkaitan dengan topik penelitian

baik di media cetak maupun elektronik guna memperoleh landasan teori yang komprehensif.

1.9.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mix method atau metode kombinasi merupakan metode pada penelitian yang menganalisis data yang diperoleh dari responden ataupun data yang bersifat numerik kemudian digabungkan dengan analisis kualitatif. Adapun teknik analisis data yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah teknik analisis data dengan Eksplanatori Sekuensial.

1. Analisis Statistik Data

Analisis regresi logistik adalah analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi logistik adalah regresi yang menguji apakah variabel independen dapat memprediksi kemungkinan atau terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen.

Dalam analisis ini terdapat variabel data biner (*dummy*) yaitu Peran TPID, hal ini untuk mengetahui bagaimana peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap penurunan inflasi di Provinsi Jambi setelah dan sebelum terjadi inflasi pada tahun 2022. Maka penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik berganda. Analisis regresi logistik merupakan metode yang menganalisis hubungan antarvariabel dalam suatu penelitian. Dengan menggunakan metode sebagai berikut:

$$\hat{p} = \frac{\exp (b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_PX_P)}{1 + \exp (b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_PX_P)}$$

Maka dalam regresi ini tidak ada membutuhkan untuk distribusi normal variabel independen dalam analisis regresi logistik.²⁰ Oleh karena itu, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan asumsi klasik tidak diperlukan untuk variabel independen dalam analisis regresi logistik. Empat pengujian digunakan dalam analisis regresi logistik: Evaluasi Model Keseluruhan (*Overall Model Fit*), Evaluasi Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*), Determinasi Koefisien (*Nagelkerke's R Square*), dan Klasifikasi Matriks.²¹ Penjelasan mengenai keempat pengujian model sebagai berikut:

a. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, maka dapat menggunakan *overall model fit*. Statistik yang digunakan didasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood L adalah tingkat kemungkinan bahwa model yang dihipotesakan akan menggambarkan data input.²² L diubah menjadi $-2\log$ kemungkinan untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai $-2LL$ awal dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya. Jika nilai $-2LL$ nomor blok = 0 lebih besar dari nilai $-2LL$ nomor blok = 1, maka penurunan ($-2\log L$) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik. Hipotesis berikut digunakan untuk menguji model secara keseluruhan:

²⁰ Ghozali, I., (2018), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, (9th ed., Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²¹ *ibid*

²² *ibid*

H0 : Model yang dihipotesiskan dengan fit data

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak dengan fit data.

b. Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Metode Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi. Nilai *chi square* digunakan untuk mengevaluasi ini. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model karena tidak ada perbedaan antara data dan model, sehingga model dianggap sesuai.²³ Hipotesis ini adalah sebagai berikut: 1. Jika nilai probabilitas (*P-Value*) kurang dari 0.05 (nilai signifikansi), H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara model dan nilai yang dia amati. Namun, jika nilai probabilitas (*P-Value*) lebih dari 0.05 (nilai signifikansi), H0 diterima, yang menunjukkan bahwa *Goodness of Fit Test* dapat memprediksi nilai yang dia amati..

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam regresi logistik diukur menggunakan Nagelkerke R Square, karena nilai ini dapat diinterpretasikan mirip dengan R Square pada regresi berganda. Nagelkerke R Square adalah versi modifikasi dari koefisien Cox and Snell, yang memastikan bahwa nilai tersebut berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Nagelkerke R Square mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Nagelkerke R Square mendekati satu, ini

²³ *ibid*

berarti variabel independen mampu memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen.²⁴

d. Matriks Klasifikasi

Dalam matriks 2 x 2, dihitung nilai prediksi yang benar (*correct*) dan yang salah (*incorrect*). Matriks ini memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi keseluruhan model. Jika terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel independen, biasanya di atas 0,90, hal ini menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas.²⁵

2. Model Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan analisis regresi logistik. Tujuannya adalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian, yaitu menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, persamaan regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Probabilitas Peran TPID Provinsi Jambi
α	: Konstanta
β_1	: Koefisien Regresi Tingkat Inflasi
X1	: Tingkat Inflasi
β_2	: Koefisien Regresi IHK
X2	: Indeks Harga Konsumen (IHK)
E	: error

²⁴ *ibid*

²⁵ Ghozali, Imam, (2006), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4), Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

3. Uji Hipotesis

a. Uji Wald (Uji Parsial t)

Pada dasarnya, uji Wald (t) digunakan untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial pada variabel dependen.²⁶ Tingkat signifikansi sebesar 5% diperlukan untuk menentukan nilai uji Wald (uji t). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$, maka H_0 diterima, yang berarti bahwa salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen
- b) jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients* (Uji Simultan F)

Uji statistik Omnibus untuk koefisien model dilakukan secara bersamaan (uji f). Studi ini akan menyelidiki bagaimana variabel dependen dan variabel independen berpengaruh bersamaan.²⁷ Dengan tingkat signifikansi 5%, kriteria pengambilan keputusan berikut berlaku:

- a) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $(P\text{-Value}) < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.
- b) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $(P\text{-Value}) > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

2. Analisis Teori Kebijakan

Menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh TPID setelah didapatkan data peran TPID yang mempengaruhi penurunan angka inflasi di Provinsi Jambi menggunakan penjelasan empat indikator implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III.

3. Pengukuran Tingkat Persistensi Inflasi

Dalam menentukan bagaimana persistensi inflasi menggunakan model *autoregressive* (AR). Hal ini karena pada model AR dapat mengukur persistensi inflasi sehingga dapat melihat naik turunnya inflasi. *Model autoregressive* (AR) dalam bentuk *time series* merupakan pendekatan yang sesuai dalam menentukan hasil penelitian ini karena lazim digunakan dalam riset empiris, Adapun formula pada AR dapat dijabarkan pada rumus berikut:

$$\Pi_t = \mu + \sum_j^k = 1 \alpha_j \pi_{t-j} + \varepsilon_t$$

Dimana:

Π_t	: tingkat inflasi bulanan pada waktu t
μ	: konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi
$\sum_j^k = 1 \alpha_j$: jumlah koefisien AR
ε_t	: Random error term atau residual dari regresi persamaan di atas inflasi

Kemudian, untuk menjumlahkan koefisien AR dalam mengetahui tingkat persistensi menggunakan rumus berikut:

$$\rho = \sum_j^k = 1 \alpha_j$$

4. Analisis Sumber dan Lama Waktu Persistensi

Setelah pengukuran persistensi maka dilanjutkan dengan menganalisis sumber persistensi inflasi di Provinsi Jambi terutama dari sisi penawaran. Untuk menghitung sumber persistensi, gunakan *Partial Adjustment Model* (PAM) dengan persamaan awal berikut:

$$Y_t = \gamma\beta_0 + \gamma\beta_0 X_t + 1 - \gamma Y_{t-1} + vt ; \quad \text{dimana } vt = \delta et$$

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model PAM yang termasuk sebagai model *autoregressive*, dapat dilihat pada rumus berikut :

$$\begin{aligned} INF_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{MAKANAN}_t + \beta_2 \text{PAKAIAN}_t + \beta_3 \text{PERUMAHAN}_t + \beta_4 \text{PERLENGKAPAN}_t \\ & + \beta_5 \text{KESEHATAN}_t + \beta_6 \text{TRANSPORTASI}_t + \beta_7 \text{INFORMASI}_t + \beta_8 \text{REKREASI}_t + \\ & \beta_9 \text{PENDIDIKAN}_t + \beta_{10} \text{RESTORAN}_t + \beta_{11} \text{PRIBADI}_t + \\ & 1 - \delta INF_{t-1} + vt \end{aligned}$$

Dimana:

INF	= tingkat inflasi
MAKANAN	= indeks harga kelompok makanan jadi dan minuman
PAKAIAN	= indeks harga kelompok pakaian dan alas kaki
PERUMAHAN	= indeks harga kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga
PERLENGKAPAN	= indeks harga kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
KESEHATAN	= indeks harga kelompok kesehatan
TRANSPORTASI	= indeks harga kelompok transportasi dan komunikasi
INFORMASI	= indeks kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan
REKREASI	= indeks kelompok rekreasi. Olahraga dan budaya
PENDIDIKAN	= indeks harga kelompok pendidikan
RESTORAN	= indeks harga kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran
PRIBADI lainnya	= indeks harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya
B	= koefisien
vt	= <i>error terms</i>

Adapun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan inflasi kembali ke tingkat alamiahnya dengan menghitung *half-life* sehingga memperlihatkan waktu untuk kembali pada keseimbangan awal setelah adanya guncangan.

$$h = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Dimana:

ρ = derajat persistensi inflasi

h = lamanya waktu

Rumus ini merupakan alat yang berguna dalam memahami proses pemulihan inflasi setelah terjadi guncangan ekonomi (shock). Melalui penggunaan rumus ini, kita dapat mengestimasi jangka waktu yang diperlukan bagi inflasi untuk kembali ke tingkat keseimbangan awal atau nilai alamiah setelah terganggu oleh guncangan tersebut. Tingkat inflasi alamiah ini sering kali dianggap sebagai tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, di mana tidak ada tekanan inflasi atau deflasi yang signifikan.

Dengan memahami durasi yang diperlukan bagi inflasi untuk pulih, para pengambil kebijakan, seperti pemerintah dan bank sentral, dapat merancang langkah-langkah intervensi yang tepat untuk menstabilkan ekonomi, mengelola ekspektasi inflasi, dan menjaga keseimbangan jangka panjang. Pemahaman ini juga penting untuk mencegah tindakan kebijakan yang berlebihan atau kurang tepat, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi daripada memperbaikinya. Dengan demikian, rumus ini memiliki peran sentral dalam analisis dinamika inflasi dan pemulihan ekonomi pasca guncangan.